

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan fokus pada penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada layanan publik. Lokasi penelitian mencakup 15 objek yang terdiri atas 5 kantor kecamatan, 5 puskesmas, dan 5 sekolah yang tersebar di lima wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Tengah.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menggambarkan tiga sektor layanan publik utama, yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Ketiga sektor ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Secara umum, kondisi lokasi penelitian menunjukkan variasi dalam penyediaan fasilitas disabilitas, baik dari segi ketersediaan maupun kelayakan fasilitas. Perbedaan kondisi antar lokasi ini menjadi dasar penting dalam menganalisis tingkat pemenuhan aksesibilitas di Kota Banjarmasin.

Selain melalui observasi, penelitian ini juga dilengkapi dengan data hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait di masing-masing lokasi penelitian, seperti aparaturnya kecamatan, tenaga kesehatan di

puskesmas, serta tenaga pendidik di sekolah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, perencanaan, serta kendala dalam penyediaan fasilitas disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di beberapa lokasi masih berada pada tahap pengembangan dan dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, terdapat indikasi upaya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan di dua lokasi penelitian, meskipun praktik tersebut belum diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

Dengan demikian, kombinasi antara data observasi dan wawancara dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual penyediaan fasilitas disabilitas, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Ketersediaan Secara Keseluruhan**

Pemaparan data mengenai fasilitas disabilitas berdasarkan hasil penelitian lapangan dibagi ke dalam empat bagian. Pertama, peneliti menyajikan gambaran umum ketersediaan fasilitas disabilitas secara keseluruhan. Kedua, peneliti membahas ketersediaan fasilitas disabilitas berdasarkan wilayah, yakni lima kecamatan di Kota Banjarmasin. Ketiga, peneliti menguraikan ketersediaan fasilitas disabilitas

berdasarkan bidang layanan, meliputi layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Keempat, peneliti menganalisis kesesuaian antara fasilitas disabilitas yang tersedia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rincian teknis desain fasilitas disabilitas.

Observasi lapangan yang peneliti lakukan pada 15 lokasi, yang terdiri atas 5 kantor kecamatan, 5 puskesmas, dan 5 sekolah di wilayah Kota Banjarmasin, menunjukkan adanya variasi ketersediaan fasilitas disabilitas. Temuan-temuan ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat pemenuhan fasilitas disabilitas pada lokasi penelitian dan menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut.

Fasilitas disabilitas yang paling banyak tersedia di lokasi penelitian adalah *handrail* (pegangan tangan) dan toilet. *Handrail* merupakan salah satu fasilitas aksesibilitas yang pengaturannya termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat 11 lokasi yang telah menyediakan *handrail*. Fasilitas tersebut tersedia di 3 kantor kecamatan, 5 puskesmas, dan 3 sekolah. Sedangkan 4 lokasi lainnya belum menyediakan fasilitas tersebut, yaitu 2 kantor kecamatan dan 2 sekolah yang merupakan sekolah reguler atau non Sekolah Luar Biasa (SLB).

Selanjutnya, fasilitas disabilitas yang paling banyak tersedia setelah *handrail* adalah toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi, jumlah lokasi yang telah menyediakan toilet disabilitas sebanyak 11 lokasi yang terbagi di 3 kantor kecamatan, 5 puskesmas dan 3 sekolah. Sedangkan jumlah lokasi yang belum menyediakannya sebanyak 4 lokasi, yaitu di 2 kantor kecamatan, dan 2 sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan toilet disabilitas belum merata di seluruh lokasi penelitian.

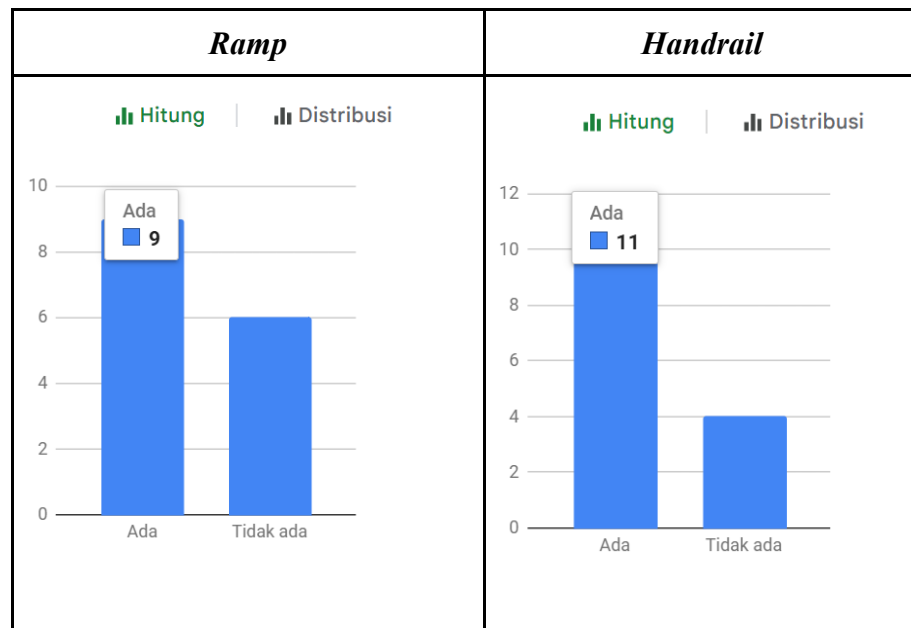
Fasilitas disabilitas yang paling sedikit tersedia di lokasi penelitian adalah parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini diatur dalam Bagian III Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi lapangan, dari 15 lokasi yang diteliti hanya 1 lokasi yang menyediakan fasilitas parkir disabilitas, yaitu Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah. Fasilitas parkir disabilitas di lokasi tersebut dapat mengakomodasi satu unit mobil atau sekitar lima unit sepeda motor.

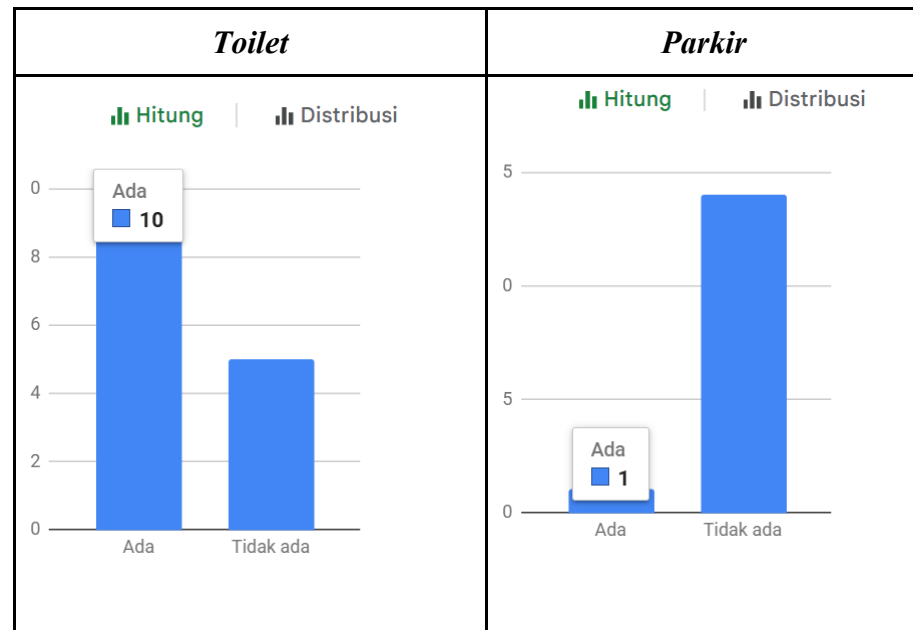
Lebih lanjut, fasilitas disabilitas dengan selisih paling kecil antara ketersediaan dan ketidakterseediaannya adalah *ramp* atau jalur landai. Fasilitas ini diatur dalam Bagian II Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 9 lokasi yang telah menyediakan *ramp*, yang terbagi di 4 kantor kecamatan, 4 puskesmas dan 1 sekolah. Sedangkan 6 lokasi lainnya belum menyediakan fasilitas tersebut, yaitu

di 1 kantor kecamatan, 1 puskesmas dan 4 sekolah. Keberadaan *ramp* berperan penting dalam mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengakses gedung atau lantai yang tinggi.

Paparan data ini menjadi landasan awal untuk menilai sejauh mana penyediaan fasilitas disabilitas telah dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, fasilitas disabilitas ini akan dianalisis berdasarkan wilayah, bidang layanan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1:Ketersediaan Fasilitas Disabilitas secara Keseluruhan





Sumber: Hasil observasi lapangan oleh peneliti

**Keterangan:**

1. Fasilitas disabilitas yang paling banyak tersedia adalah *handrail*.
2. Fasilitas disabilitas yang paling sedikit tersedia adalah parkir khusus disabilitas.
3. Fasilitas disabilitas dengan selisih paling kecil antara ketersediaannya dan ketidakterseediaannya adalah *Ramp*.

## 2. Ketersediaan Berdasarkan Wilayah

Pemaparan berdasarkan wilayah peneliti rasa penting untuk melihat sejauh mana pemerataan penyediaan fasilitas disabilitas di Kota Banjarmasin, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022.

Jika ditinjau secara komparatif, Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas disabilitas tertinggi. Dari keseluruhan fasilitas yang diamati, delapan fasilitas telah tersedia, sedangkan empat lainnya belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut relatif lebih responsif dalam menyediakan fasilitas aksesibilitas dibandingkan kecamatan lainnya.

Tingginya ketersediaan fasilitas di Kecamatan Banjarmasin Utara juga didukung oleh komitmen kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kecamatan memiliki beberapa program yang melibatkan penyandang disabilitas serta telah menjalin kerja sama dengan yayasan disabilitas di Kota Banjarmasin.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusional dalam mendukung penyediaan fasilitas yang lebih inklusif.

Fasilitas yang tersedia di wilayah ini didominasi oleh *handrail* dan toilet disabilitas, sementara keberadaan *ramp* dan parkir khusus disabilitas masih terbatas. Ketimpangan antar jenis fasilitas ini menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas belum dilakukan secara menyeluruh, melainkan masih berfokus pada fasilitas tertentu.

Kecamatan Banjarmasin Barat menempati posisi berikutnya dengan jumlah fasilitas tersedia sebanyak tujuh dan lima fasilitas belum tersedia. Distribusi fasilitas di wilayah ini menunjukkan pola yang lebih variatif, meskipun kekurangan masih terlihat terutama pada fasilitas parkir khusus disabilitas yang belum tersedia di seluruh jenis instansi.

Selanjutnya, Kecamatan Banjarmasin Timur menunjukkan kondisi yang relatif seimbang antara ketersediaan dan ketidakterediaan fasilitas, masing-masing sebanyak enam. Pola ini mencerminkan bahwa upaya penyediaan fasilitas telah dilakukan, namun belum mencapai tingkat

---

<sup>1</sup> Na'imah, Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 24 November 2025.

optimal karena masih terdapat kekurangan pada beberapa jenis fasilitas utama.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas di Kecamatan Banjarmasin Timur masih berada pada tahap perencanaan. Pihak kecamatan menyatakan bahwa pengadaan fasilitas seperti kursi roda dan *handrail* direncanakan pada tahun 2026. Selain itu, melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyandang disabilitas juga telah dilibatkan dalam proses perencanaan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan adanya upaya awal menuju pemenuhan aksesibilitas, meskipun implementasinya belum optimal.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan menunjukkan tingkat ketersediaan fasilitas yang relatif lebih rendah. Kedua wilayah ini memiliki jumlah fasilitas tersedia yang sama, yaitu lima, dengan tujuh fasilitas lainnya belum tersedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas disabilitas di kedua wilayah tersebut masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Rendahnya penyediaan fasilitas di Kecamatan Banjarmasin Selatan juga dipengaruhi oleh pendekatan yang masih bertahap. Berdasarkan hasil wawancara, penyediaan fasilitas dilakukan secara bertahap, seiring dengan rendahnya jumlah penyandang disabilitas yang datang ke kantor

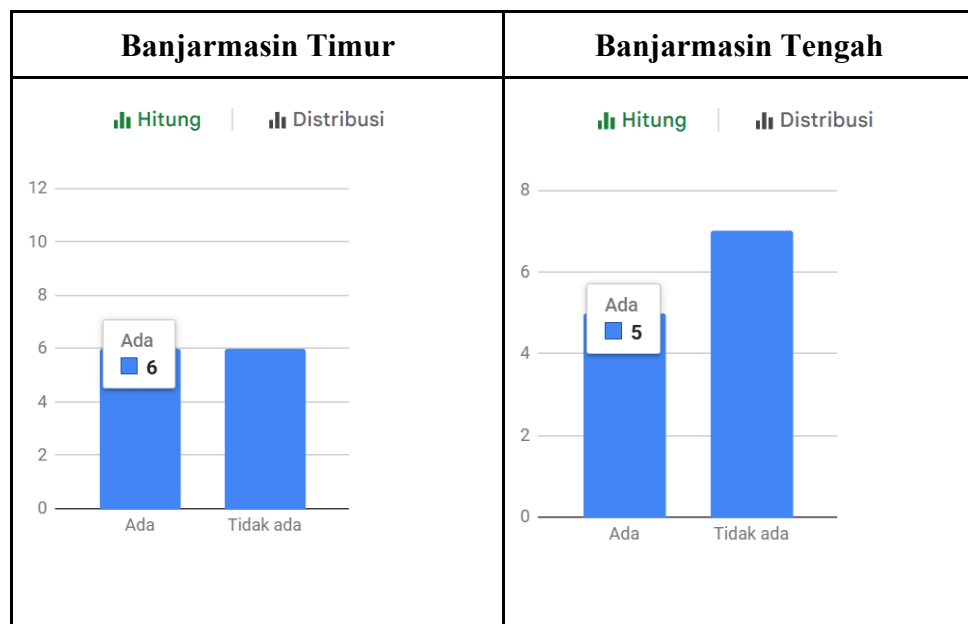
---

<sup>2</sup> Rizkia Rufaida, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Timur, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, 21 November 2025.

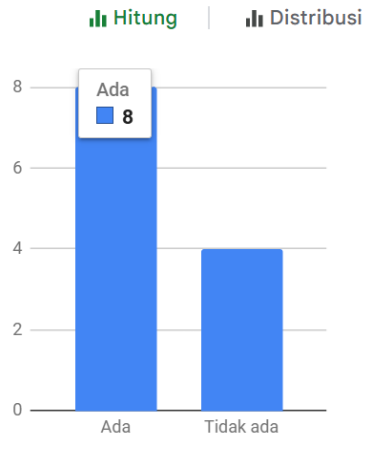
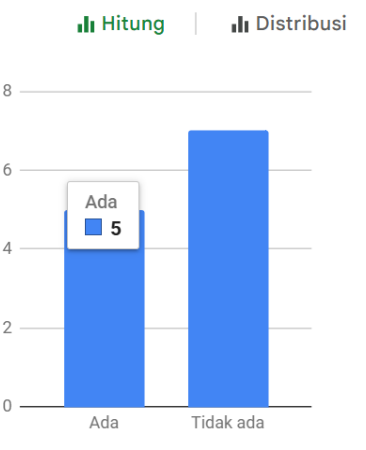
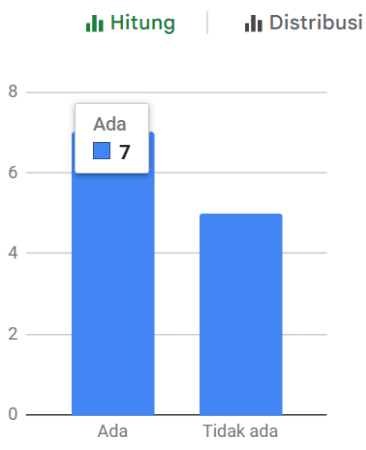
kecamatan.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas masih cenderung bersifat reaktif, bukan sebagai pemenuhan hak secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perbandingan antar wilayah menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyediaan fasilitas disabilitas di Kota Banjarmasin. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi kapasitas masing-masing wilayah, tetapi juga menunjukkan belum meratanya implementasi kebijakan terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Tabel 4.2:Ketersediaan Fasilitas Disabilitas per wilayah



<sup>3</sup> Arifin Abas, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Selatan, 25 November 2025.

Banjarmasin Utara	Banjarmasin Selatan
 <p>Bar chart for Banjarmasin Utara. The y-axis ranges from 0 to 8. The x-axis has two categories: 'Ada' and 'Tidak ada'. The 'Ada' bar has a value of 8, and the 'Tidak ada' bar has a value of 4. A legend at the top indicates 'Hitung' (green) and 'Distribusi' (blue). A tooltip for the 'Ada' bar shows 'Ada' and '8'.</p>	 <p>Bar chart for Banjarmasin Selatan. The y-axis ranges from 0 to 8. The x-axis has two categories: 'Ada' and 'Tidak ada'. The 'Ada' bar has a value of 5, and the 'Tidak ada' bar has a value of 7. A legend at the top indicates 'Hitung' (green) and 'Distribusi' (blue). A tooltip for the 'Ada' bar shows 'Ada' and '5'.</p>
Banjarmasin Barat	Rekapitulasi
 <p>Bar chart for Banjarmasin Barat. The y-axis ranges from 0 to 8. The x-axis has two categories: 'Ada' and 'Tidak ada'. The 'Ada' bar has a value of 7, and the 'Tidak ada' bar has a value of 5. A legend at the top indicates 'Hitung' (green) and 'Distribusi' (blue). A tooltip for the 'Ada' bar shows 'Ada' and '7'.</p>	<p>Urutan wilayah riset dengan fasilitas disabilitas paling banyak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjarmasin Utara</li> <li>2. Banjarmasin Barat</li> <li>3. Banjarmasin Timur</li> <li>4. Banjarmasin Tengah</li> <li>5. Banjarmasin Selatan</li> </ol>

Sumber: Hasil observasi lapangan oleh peneliti

### 3. Ketersediaan Berdasarkan Bidang Layanan

Analisis berdasarkan bidang layanan memberikan gambaran mengenai perbedaan tingkat pemenuhan fasilitas disabilitas pada setiap sektor pelayanan publik. Di antara tiga bidang layanan yang diteliti, sektor kesehatan melalui puskesmas menunjukkan tingkat penyediaan fasilitas disabilitas paling tinggi. Seluruh puskesmas yang menjadi lokasi penelitian

telah menyediakan fasilitas disabilitas, meskipun belum dalam kondisi lengkap. Dominasi fasilitas pada sektor ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kelompok rentan dalam pelayanan kesehatan.

Untuk memperjelas temuan tersebut pada tataran empiris, salah satu contoh dapat dilihat melalui hasil wawancara di Puskesmas Karang Mekar sebagai representasi praktik pelayanan di sektor kesehatan. Berdasarkan keterangan salah satu staf pelayanan, diketahui bahwa beberapa pegawai telah mengikuti pelatihan bahasa isyarat guna mempermudah komunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu. Selain itu, jumlah kunjungan penyandang disabilitas relatif sedikit dan umumnya disertai pendamping. Meskipun demikian, pihak puskesmas tetap memberikan pelayanan prioritas kepada penyandang disabilitas, sebagaimana pelayanan prioritas yang diberikan kepada lansia dan ibu hamil.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, kelengkapan fasilitas masih menjadi persoalan. Tidak ditemukannya parkir khusus disabilitas di seluruh puskesmas, serta masih terbatasnya *ramp* dan toilet yang sesuai standar, menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas yang komprehensif.

Pada sektor administrasi kependudukan, kantor kecamatan menempati posisi kedua dalam penyediaan fasilitas disabilitas. Jumlah fasilitas yang tersedia relatif cukup, namun masih terdapat kekurangan pada

---

<sup>4</sup> Cahya, Staff puskesmas bagian pelayanan Puskesmas Karang, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, 20 November 2025.

beberapa jenis fasilitas, terutama yang berkaitan dengan akses awal seperti parkir khusus disabilitas.

Sementara itu, sektor pendidikan menjadi bidang dengan tingkat penyediaan fasilitas disabilitas paling rendah. Fasilitas yang tersedia hanya ditemukan pada sekolah luar biasa, sedangkan sekolah reguler tidak menunjukkan adanya penyediaan fasilitas khusus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip pendidikan inklusif belum terlaksana secara optimal.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan tenaga pendidik di sekolah luar biasa maupun sekolah reguler. Di sekolah luar biasa, salah satu tenaga pendidik menyampaikan bahwa belum lengkapnya penyediaan fasilitas disabilitas disebabkan oleh pola pendampingan intensif, di mana hampir seluruh aktivitas siswa selalu didampingi oleh guru atau pegawai sekolah. Selain itu, adanya penyalahgunaan fasilitas oleh siswa turut menyebabkan beberapa fasilitas berada dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki.<sup>5</sup> Sementara itu, temuan di sekolah reguler menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak pernah memiliki siswa dengan disabilitas fisik berat. Hanya saja ada beberapa siswa dengan kondisi disabilitas mental ringan yang mana kondisi tersebut tidak memerlukan fasilitas khusus,

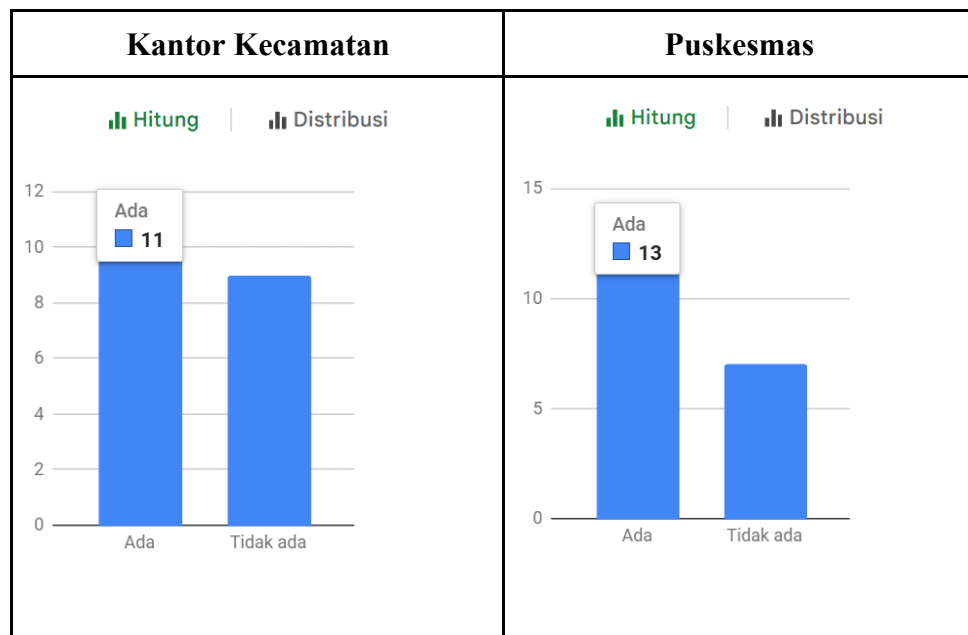
---

<sup>5</sup> Icha, Tenaga Pendidik SLB Plus Madana Dun Ya, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Utara, 21 November 2025.

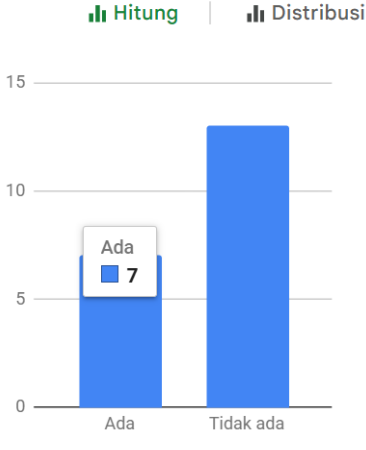
melainkan lebih membutuhkan pendekatan yang intensif dalam proses pembelajaran.<sup>6</sup>

Perbandingan antar bidang layanan ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas disabilitas masih bersifat sektoral. Sektor kesehatan relatif lebih maju, sementara sektor pendidikan masih tertinggal. Hal ini menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas belum berjalan secara merata di seluruh sektor pelayanan publik.

Tabel 4.3:Ketersediaan Fasilitas Disabilitas per Bidang Layanan



<sup>6</sup> Siti Norafifah, Guru BK SMP Sabial Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Tengah, 27 November 2025.

Sekolah	Rekapitulasi						
 <p>Bar chart showing the distribution of schools with and without facilities. The 'Ada' category has a value of 7, and the 'Tidak ada' category has a value of 13. The chart includes a legend for 'Hitung' (green) and 'Distribusi' (blue).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ada</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Ada	7	Tidak ada	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas</li> <li>2. Kantor Kecamatan</li> <li>3. Sekolah</li> </ol> <p>Urutan instansi yang diobservasi dengan fasilitas disabilitas paling banyak.</p>
Kategori	Jumlah						
Ada	7						
Tidak ada	13						

Sumber: Hasil observasi lapangan oleh peneliti

Sebagai rekapitulasi hasil penelitian, sektor layanan kesehatan (Puskesmas) menempati posisi teratas dalam penyediaan fasilitas disabilitas, dengan total 13 fasilitas yang tersedia. Dari berbagai jenis fasilitas yang diamati, *handrail* menjadi sarana yang paling banyak ditemukan, yakni sebanyak 11 unit. Secara wilayah, Kecamatan Banjarmasin Utara tercatat sebagai kawasan dengan ketersediaan fasilitas disabilitas terbanyak, yaitu 8 fasilitas, sehingga relatif lebih responsif dibandingkan kecamatan lainnya.

Sebaliknya, sektor layanan pendidikan (sekolah) masih menunjukkan keterbatasan. Jumlah fasilitas disabilitas di bidang ini hanya mencapai 7 fasilitas, dan seluruhnya berada di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah reguler belum menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, yang menunjukkan masih terbatasnya penerapan prinsip pendidikan inklusif. Dari sisi wilayah, Kecamatan Banjarmasin Selatan

menjadi kawasan dengan jumlah fasilitas disabilitas paling sedikit, yakni 5 fasilitas. Adapun fasilitas yang paling jarang tersedia di antara seluruh objek penelitian adalah area parkir khusus disabilitas, sehingga menjadi catatan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Setelah memaparkan ketersediaan fasilitas disabilitas, peneliti akan menganalisis kesesuaiannya dengan Standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 14 tahun 2017.

### **C. Analisis Kesesuaian Fasilitas terhadap Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017**

Kesesuaian fasilitas disabilitas dengan standar teknis merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pemenuhan aksesibilitas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 memberikan pedoman rinci mengenai standar fasilitas disabilitas, yang meliputi *ramp*, *handrail*, toilet, dan area parkir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas tidak selalu diikuti dengan kesesuaian terhadap standar. Sebagian fasilitas memang telah tersedia, namun tidak memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara pemenuhan secara kuantitatif dan kualitas fasilitas yang disediakan.

1. Kesesuaian Fasilitas Secara Umum
  - a. Kesesuaian *Ramp*

Penilaian kesesuaian *ramp* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa komponen utama yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, yaitu kemiringan *ramp*, lebar *ramp*, aspek keamanan (meliputi tepi pengaman, awalan dan akhiran datar, serta ubin peringatan), serta pegangan rambat (*handrail*). Setiap komponen dianalisis untuk menilai sejauh mana kondisi *ramp* di lapangan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Sebagai fasilitas utama mobilitas, *ramp* menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang cukup tinggi. Meskipun telah tersedia di beberapa lokasi, tidak terdapat satu pun *ramp* yang sepenuhnya memenuhi standar. Permasalahan utama terletak pada kemiringan yang terlalu curam, kurangnya elemen pengaman, serta ketidaksesuaian dimensi dan *handrail*.

Dari aspek kemiringan, sebagian besar *ramp* berada di atas batas standar yang ditentukan sehingga berpotensi membahayakan pengguna kursi roda. Sementara itu, dari sisi lebar, sebagian besar *ramp* telah memenuhi ketentuan minimal, meskipun masih terdapat beberapa lokasi yang belum sesuai.

Pada aspek keamanan, ketidaksesuaian terutama disebabkan oleh tidak tersedianya tepi pengaman dan ubin peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan fasilitas *ramp*. Selain itu, tinggi *handrail*

pada sebagian besar lokasi juga tidak sesuai dengan standar ergonomis, sehingga berpotensi mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan *ramp* masih cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan prinsip aksesibilitas yang aman dan inklusif.

Temuan ini juga dipengaruhi oleh kondisi pembangunan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara di Puskesmas Pemurus Dalam, diketahui bahwa fasilitas masih berada dalam tahap pembangunan sehingga beberapa sarana belum tersedia atau belum dapat digunakan secara optimal, termasuk *ramp* yang belum memenuhi standar teknis.<sup>7</sup>

#### 1) Kemiringan *Ramp*

Selanjutnya, berdasarkan tabel perbandingan kemiringan *ramp* antara standar dan realisasi di lapangan, sebagian besar *ramp* yang ditemukan memiliki tingkat kemiringan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

---

<sup>7</sup> Lismariyanti, Kepala Tata Usaha puskesmas Pemurus Dalam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Selatan, 19 November 2025.

Tabel 4.4:Perbandingan Kemiringan *Ramp* antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Posisi <i>Ramp</i>	Kemiringan <i>Ramp</i>	Deviasi dari Standar
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	Di Luar	20% (1:5)	+11,67% (terlalu curam, tidak sesuai)
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	Di Luar	17,86% (1:5,6)	+9,53% (terlalu curam, tidak sesuai)
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	DI Luar	12,5% (1:8)	+4,17% (terlalu curam, tidak sesuai)
4	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	Di Luar	0,6% (1:167)	-7,73% (lebih landai, sesuai)
5	Puskesmas Karang Mekar	Di Luar	20% (1:5)	+11,67% (terlalu curam, tidak sesuai)
6	Puskesmas Sungai Jingah	Di Luar	3,75% (1:26,6)	-4,58% (lebih landai, sesuai)
7	Puskesmas Pemurus Dalam	Di Luar	9% (1:11,1)	+0,67% (sedikit lebih curam, sedikit diatas standar)
8	Puskesmas S.Parman	Di Luar	19,23% (1:5,2)	+10,9% (terlalu curam, tidak sesuai standar)

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Posisi <i>Ramp</i>	Kemiringan <i>Ramp</i>	Deviasi dari Standar
9	SLB Negeri 3 Banjarmasin	Di Dalam	7,32% (1:13,6)	-1,01% (sesuai)

**Catatan:** Standar kemiringan *Ramp* adalah 1:10 untuk di dalam ruangan, dan 1:12 untuk di luar ruangan.

Dari sembilan lokasi penelitian, hanya tiga lokasi yang memiliki kemiringan yang sesuai atau lebih landai dari standar, yaitu Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Puskesmas Sungai Jingah, dan SLB Negeri 3 Banjarmasin. Sementara itu, enam lokasi lainnya memiliki kemiringan yang terlalu curam, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan deviasi yang cukup besar dari standar yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar *ramp* belum dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kemiringan yang aman bagi pengguna kursi roda.

## 2) Lebar *Ramp*

Dari sisi dimensi lebar *ramp*, sebagian besar lokasi penelitian telah memenuhi standar minimal lebar *ramp* yaitu 120 cm.

Tabel 4.5: Perbandingan Lebar *Ramp* antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Lebar <i>Ramp</i> (cm)	Standar Lebar ( $\geq 120$ cm)	Deviasi dari Standar
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	175	Memenuhi	+ 55 cm
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	110	Tidak Memenuhi	-10 cm
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	120	Memenuhi	0 cm
4	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	120	Memenuhi	0 cm
5	Puskesmas Karang Mekar	112	Tidak Memenuhi	-8 cm
6	Puskesmas Sungai Jingah	154	Memenuhi	+34 cm
7	Puskesmas Pemurus Dalam	120	Memenuhi	0 cm
8	Puskesmas S.Parman	100	Tidak Memenuhi	-20 cm
9	SLB Negeri 3 Banjarmasin	138	Memenuhi	+18 cm

Dari sembilan lokasi penelitian, enam *ramp* memenuhi standar lebar yang ditetapkan, sedangkan tiga *ramp* lainnya masih berada di bawah standar, yaitu pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan, Puskesmas Karang Mekar, dan Puskesmas S. Parman. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum *ramp* telah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi

pengguna kursi roda, meskipun masih terdapat beberapa lokasi yang belum memenuhi ketentuan standar.

### 3) Keamanan *Ramp*

Dari aspek keamanan *ramp*, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Penilaian keamanan *ramp* dilakukan dengan metode pembobotan berdasarkan tingkat keamanan, yaitu tepi pengaman dengan bobot 40%, awalan dan akhiran *ramp* yang datar dengan bobot 35%, serta ubin peringatan dengan bobot 25%.

Tabel 4.6:Perbandingan Keamanan *Ramp* antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi	Tepi Pengaman (40)	Awalan Datar (35)	Ubin Peringatan (25)	Skor	Kategori
1	Kecamatan Banjarmasin Tengah	0	0	25	25	Tidak Memenuhi
2	Kecamatan Banjarmasin Selatan	0	0	0	0	Tidak Memenuhi
3	Kecamatan Banjarmasin Barat	40	35	0	75	Memenuhi

No	Lokasi	Tepi Pengaman (40)	Awalan Datar (35)	Ubin Peringatan (25)	Skor	Kategori
4	Kecamatan Banjarmasin Utara	0	0	0	0	Tidak Memenuhi
5	Puskesmas Karang Mekar	0	35	0	35	Tidak Memenuhi
6	Puskesmas Sungai Jingah	0	35	25	60	Belum Memenuhi
7	Puskesmas Pemurus Dalam	0	35	0	35	Tidak Memenuhi
8	Puskesmas S. Parman	0	35	0	35	Tidak Memenuhi
9	SLB Negeri 3 Banjarmasin	0	35	25	60	Belum Memenuhi

Kategori memenuhi diberikan kepada lokasi yang memiliki mayoritas elemen teknis utama dengan perolehan skor yang tinggi (ambang batas sekitar  $\geq 75$ ). Kategori belum memenuhi merupakan fase transisi di mana fasilitas sudah mulai memperhatikan aksesibilitas namun belum mencapai standar keamanan yang paripurna (rentang skor berada di angka 60).

Sedangkan kategori tidak memenuhi menunjukkan tingkat aksesibilitas yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, dengan skor di bawah 40 (rentang skor 0 - 35).

Hasil penilaian menunjukkan bahwa hanya satu lokasi yang masuk dalam kategori memenuhi, yaitu Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Dua lokasi berada pada kategori belum memenuhi, yaitu Puskesmas Sungai Jingah dan SLB Negeri 3 Banjarmasin, sedangkan enam lokasi lainnya berada pada kategori tidak memenuhi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya tepi pengaman pada sebagian besar *ramp* yang diamati, meskipun beberapa lokasi telah memiliki awalan *ramp* yang datar atau ubin peringatan.

#### 4) Pegangan rambat (*Handrail*) pada *Ramp*

Selanjutnya, dari aspek pegangan rambat (*handrail*), sebagian besar *ramp* memiliki tinggi *handrail* yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 4.7:Perbandingan Pegangan Rambat (*Handrail*) pada *Ramp* antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Tinggi <i>Handrail</i>	Standar Tinggi (80cm)	Deviasi dari Standar Tinggi
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	85 cm	Tidak Memenuhi	+5 cm
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	110 cm	Tidak Memenuhi	+30 cm
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	95 cm	Tidak Memenuhi	+15 cm
4	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	80 cm	Memenuhi	0 cm
4	Puskesmas Karang Mekar	108 cm	Tidak Memenuhi	+28 cm
6	Puskesmas Sungai Jingah	90 cm	Tidak Memenuhi	+10 cm
7	Puskesmas Pemurus Dalam	85 cm	Tidak Memenuhi	+5 cm
8	Puskesmas S.Parman	95 cm	Tidak Memenuhi	+15 cm
9	SLB Negeri 3 Banjarmasin	105 cm	Tidak Memenuhi	+25 cm

**Catatan:** Standar *Handrail* pada *Ramp* adalah 65 cm untuk anak-anak, dan 80 cm untuk dewasa

Dari sembilan lokasi penelitian, hanya satu lokasi yang memiliki tinggi *handrail* yang sesuai dengan standar, yaitu Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara. Delapan lokasi lainnya memiliki tinggi *handrail* yang melebihi standar, sehingga berpotensi menyulitkan pengguna *ramp* dalam menjangkaunya. Meskipun demikian, dari segi permukaan *handrail*, seluruh lokasi penelitian telah memenuhi standar karena memiliki permukaan yang halus, aman, dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna.

Tabel 4.8: Perbandingan Permukaan *Handrail* pada *Ramp* antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Permukaan <i>handrail</i> pada <i>Ramp</i>	Standar Permukaan <i>handrail</i> (aman, nyaman, bebas permukaan tajam/kasar)
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	Halus	Memenuhi
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	Halus	Memenuhi
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	Halus	Memenuhi

No	Lokasi <i>Ramp</i>	Permukaan <i>handrail</i> pada <i>Ramp</i>	Standar Permukaan <i>handrail</i> (aman, nyaman, bebas permukaan tajam/kasar)
4	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	Halus	Memenuhi
5	Puskesmas Karang Mekar	Halus	Memenuhi
6	Puskesmas Sungai Jingah	Halus	Memenuhi
7	Puskesmas Pemurus Dalam	Halus	Memenuhi
8	Puskesmas S.Parman	Halus	Memenuhi
9	SLB Negeri 3 Banjarmasin	Halus	Memenuhi

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian *ramp* di lokasi penelitian terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kemiringan *ramp* yang terlalu curam, tidak tersedianya tepi pengaman sebagai komponen utama keamanan, serta tinggi *handrail* yang melebihi standar. Meskipun sebagian besar *ramp* telah memenuhi standar lebar dan memiliki permukaan *handrail* yang aman, kekurangan pada komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa fasilitas *ramp* yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa

penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada beberapa fasilitas pelayanan publik di lokasi penelitian masih perlu ditingkatkan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna.

b. Kesesuaian *handrail*

Temuan mengenai ketidaksesuaian *ramp* tersebut juga sejalan dengan kondisi fasilitas aksesibilitas lainnya, khususnya *handrail*, yang memiliki fungsi pendukung dalam menjamin keselamatan pengguna. *Handrail* belum tersedia secara merata di seluruh lokasi penelitian, terutama pada area *ramp* dan tangga. Berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, *handrail* merupakan elemen penting dalam menjamin keamanan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan *handrail* yang tersedia, hanya lima *handrail* yang telah sesuai dengan standar, sedangkan enam *handrail* lainnya tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Lima *handrail* yang sesuai standar tersebut ditemukan di satu kantor kecamatan, tiga puskesmas dan satu sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek keamanan dan aksesibilitas melalui penyediaan *handrail* di lokasi penelitian masih belum optimal.

Tabel 4.9:Perbandingan Tinggi Pegangan Rambat (*Handrail*) antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi	Tinggi <i>Handrail</i>	Standar Tinggi <i>Handrail</i> (80 cm)	Deviasi dari Standar
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	94 cm	Tidak Memenuhi	+14 cm
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	80 cm	Memenuhi	0 cm
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	105 cm	Tidak Memenuhi	+20 cm
4	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	95 cm	Tidak Memenuhi	+15 cm
5	Puskesmas Cempaka Besar	90 cm	Tidak Memenuhi	+10 cm
6	Puskesmas Sungai Jingah	90 cm	Tidak Memenuhi	+10 cm
7	Puskesmas Karang Mekar	80 cm	Memenuhi	0 cm
8	Puskesmas Pemurus Dalam	100 cm	Tidak Memenuhi	+ 20cm
9	Puskesmas S. Parman	95 cm	Tidak Memenuhi	+15 cm
10	SLB Negeri 2 Banjarmasin	95 cm	Tidak Memenuhi	+15 cm
11	SLB Negeri 3 Banjarmasin	105 cm	Tidak Memenuhi	+25 cm

No	Lokasi	Tinggi Handrail	Standar Tinggi Handrail (80 cm)	Deviasi dari Standar
12	SLB Plus Madana Dun Ya	80 cm	Memenuhi	0 cm

c. Kesesuaian Toilet Disabilitas

Selain *ramp* dan *handrail*, fasilitas toilet khusus disabilitas juga menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang cukup signifikan. Toilet khusus disabilitas pada beberapa lokasi penelitian belum memenuhi standar ukuran dan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian, dari total sepuluh toilet disabilitas yang ditemukan di lokasi penelitian, hanya dua toilet yang telah sesuai dengan standar, sedangkan delapan toilet lainnya belum memenuhi ketentuan teknis toilet disabilitas. Dua toilet yang memenuhi standar tersebut ialah toilet yang tersedia di puskesmas Sungai Jingah dan puskesmas Pemurus Dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas sanitasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian masih belum optimal dan berpotensi menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang setara.

1) Ukuran Toilet

Tabel 4.10:Perbandingan Ukuran Toilet Khusus Disabilitas antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi	Ukuran Toilet Disabilitas di Lokasi	Perbandingan dengan Ukuran Minimal
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	190x135 cm	<p>The diagram shows two rectangles on a grid. The left rectangle represents the 'ukuran minimal toilet disabilitas' with a width of 125.5 cm and a height of 227.5 cm. The right rectangle represents the 'ukuran toilet disabilitas di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah' with a width of 135 cm and a height of 190 cm.</p>
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur	Tak bisa diperiksa karena terkunci	
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	135x110 cm	<p>The diagram shows two rectangles on a grid. The left rectangle represents the 'ukuran minimal toilet disabilitas' with a width of 125.5 cm and a height of 227.5 cm. The right rectangle represents the 'ukuran toilet disabilitas Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara' with a width of 110 cm and a height of 135 cm.</p>
4	Puskesmas Karang Mekar	187x181 cm	<p>The diagram shows two rectangles on a grid. The left rectangle represents the 'ukuran minimal toilet disabilitas' with a width of 125.5 cm and a height of 227.5 cm. The right rectangle represents the 'ukuran toilet disabilitas di Puskesmas Karang Mekar' with a width of 187 cm and a height of 181 cm.</p>
5	Puskesmas Sungai Jinhah	190x181 cm	<p>The diagram shows two rectangles on a grid. The left rectangle represents the 'ukuran minimal toilet disabilitas' with a width of 125.5 cm and a height of 227.5 cm. The right rectangle represents the 'ukuran toilet disabilitas di Puskesmas Sungai Jinhah' with a width of 190 cm and a height of 181 cm.</p>
6	Puskesmas Pemurus Dalam	227x135 cm	<p>The diagram shows two rectangles on a grid. The left rectangle represents the 'ukuran minimal toilet disabilitas' with a width of 125.5 cm and a height of 227.5 cm. The right rectangle represents the 'ukuran toilet disabilitas di Puskesmas Pemurus Dalam' with a width of 227 cm and a height of 135 cm.</p>

No	Lokasi	Ukuran Toilet Disabilitas di Lokasi	Perbandingan dengan Ukuran Minimal
7	Puskesmas S.Parman	176x124 cm	
8	SLB Negeri 3 Banjarmasin	190x130 cm	
9	SLB Negeri 2 Banjarmasin	190x160 cm	
10	SLB Plus Madana Dun Ya	Toilet non-disabilitas yang digunakan oleh penyandang disabilitas dengan bantuan guru	

## 2) Pintu Toilet

Tabel 4.11:Perbandingan Pintu Toilet Khusus Disabilitas antara Standar dan Realisasi di Lapangan

No	Lokasi Toilet	Arah Buka	Lebar Pintu	Standar Lebar Pintu (90 cm)	Deviasi dari Standar
1	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ke Dalam	88 cm	Tidak Memenuhi	-2 cm

No	Lokasi Toilet	Arah Buka	Lebar Pintu	Standar Lebar Pintu (90 cm)	Deviasi dari Standar
2	Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur	Ke Dalam	70 cm	Tidak Memenuhi	-20 cm
3	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	Geser	95 cm	Memenuhi	+5 cm
4	Puskesmas Karang Mekar	Ke Dalam	83 cm	Tidak Memenuhi	-7 cm
5	Puskesmas Sungai Jingah	Ke Luar	70 cm	Tidak Memenuhi	-20 cm
6	Puskesmas Pemurus Dalam	Ke Luar	80 cm	Tidak Memenuhi	-10 cm
7	Puskesmas S.Parman	Ke Dalam	70 cm	Tidak Memenuhi	-20 cm
8	SLB Negeri 3 Banjarmasin	Ke Luar	75 cm	Tidak Memenuhi	-15 cm
9	SLB Negeri 2 Banjarmasin	Ke Dalam	90 cm	Memenuhi	0
10	SLB Plus Madana Dun Ya	Ke dalam	Toilet non-disabilitas yang digunakan oleh penyandang disabilitas dengan bantuan guru		

**Catatan:** Standar lebar pintu toilet khusus disabilitas adalah 90 cm dan membuka keluar, jika membuka ke dalam harus ada ruang manuver kursi roda 180°.

#### d. Kesesuaian Parkir Disabilitas

Fasilitas parkir khusus disabilitas merupakan fasilitas yang paling sedikit ditemukan di lokasi penelitian. Dari seluruh lokasi penelitian, hanya satu lokasi yang menyediakan area parkir khusus

disabilitas, yaitu kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, pada lokasi ini pun parkir yang tersedia hanya parkir untuk sepeda motor yang bisa menampung sekitar 5 buah sepeda motor. Namun demikian, fasilitas parkir tersebut masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan penanda yang jelas sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan dan masih memerlukan perhatian serius dari penyelenggara pelayanan publik.

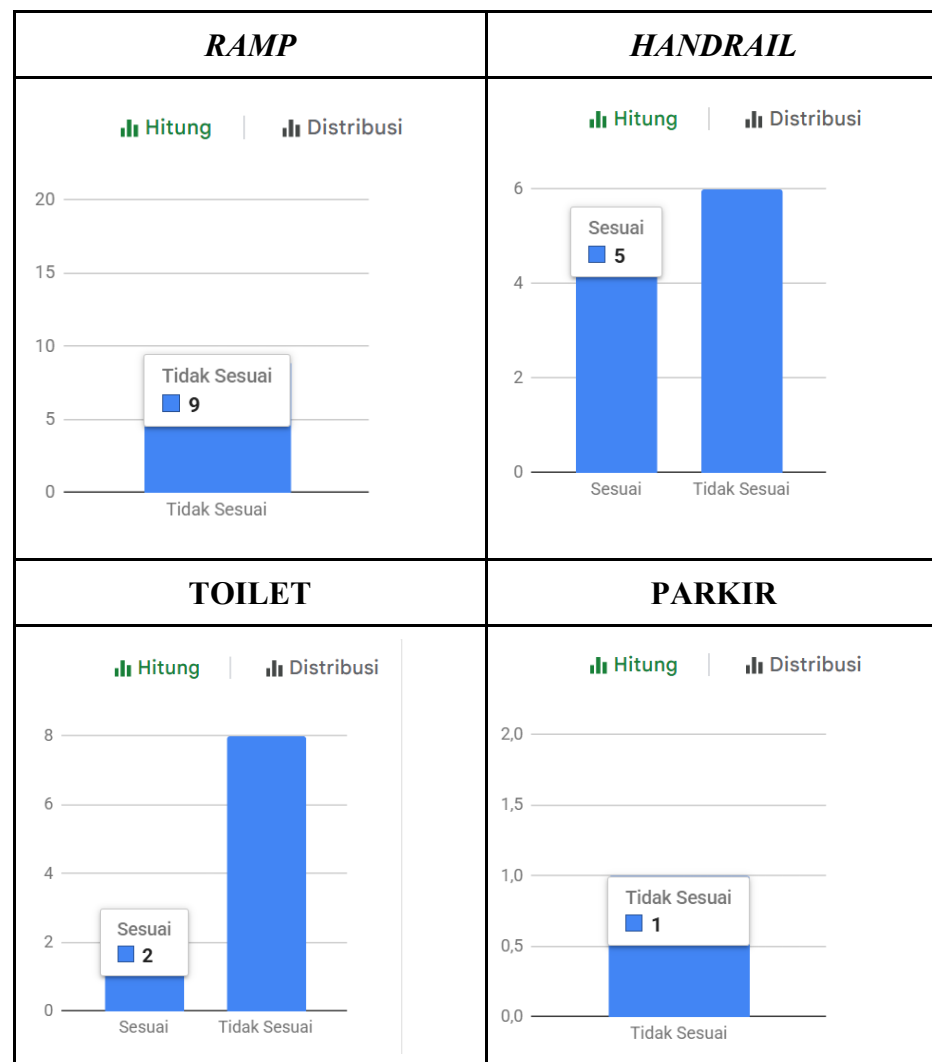
Tabel 4.12:Kesesuaian Teknis Parkir Khusus Disabilitas di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Dilihat Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017

No	Kelengkapan Parkir Khusus Disabilitas	Ketersediaan	Kesesuaian Teknis
1	Luas	492cm x 203 cm	Memenuhi
2	Petunjuk Arah (Penanda)	Tersedia	Memenuhi
3	kamera Pengawas	Tidak Tersedia	Tidak Memenuhi
4	Marka Parkir	Tidak Tersedia	Tidak Memenuhi
5	Rambu	Tidak Tersedia	Tidak Memenuhi

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas disabilitas di lokasi penelitian masih didominasi oleh ketidaksesuaian terhadap standar teknis yang ditetapkan dalam Permen

PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas belum dilaksanakan secara optimal dan masih cenderung bersifat formalitas, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dan pengawasan dari penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 4.13: Kesesuaian fasilitas secara keseluruhan berdasarkan standar



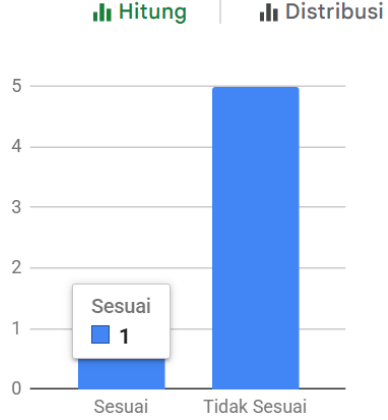
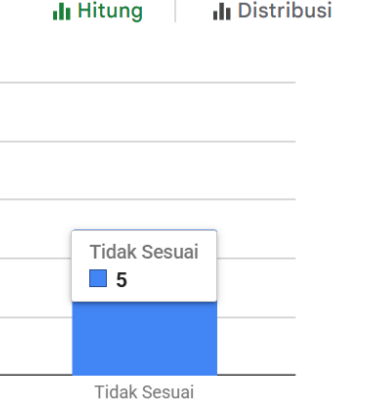
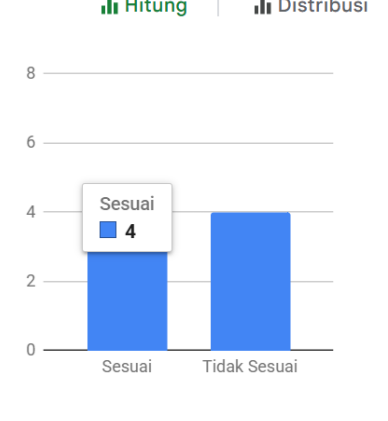
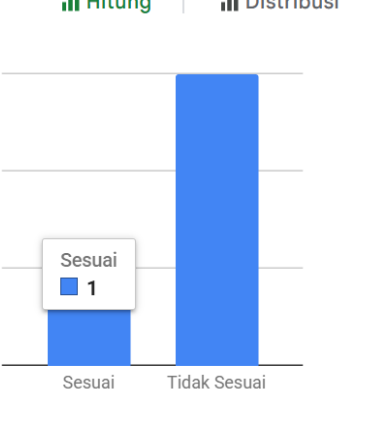
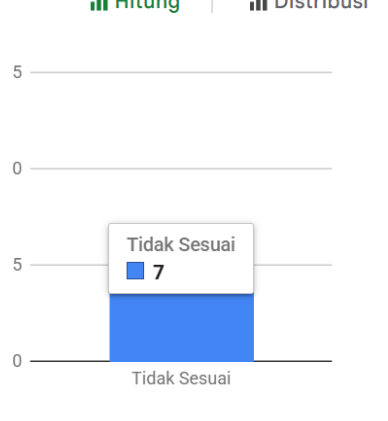
## 2. Analisis Kesesuaian Fasilitas Disabilitas Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan hasil observasi di lima wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin, diperoleh urutan wilayah dengan tingkat ketidaksesuaian fasilitas disabilitas yang paling tinggi. Pada setiap wilayah kecamatan, penelitian dilakukan pada tiga lokasi, yaitu kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah.

Dari seluruh wilayah penelitian, ditemukan bahwa wilayah dengan tingkat ketidaksesuaian fasilitas disabilitas tertinggi adalah Kecamatan Banjarmasin Barat, diikuti oleh Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ketidaksesuaian fasilitas disabilitas yang tersedia di kantor kecamatan, puskesmas, maupun sekolah tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi bangunan yang sedang dalam tahap renovasi serta keterbatasan ruang pada bangunan yang ada.

Urutan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian fasilitas disabilitas ditemukan di seluruh wilayah kecamatan, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas disabilitas di Kota Banjarmasin belum merata, khususnya dari segi kualitas dan kesesuaian terhadap standar teknis di setiap wilayah.

Tabel 4.14 Kesuaian fasilitas per wilayah berdasarkan standar

Banjarmasin Timur	Banjarmasin Tengah												
 <p>Bar chart for Banjarmasin Timur. The y-axis ranges from 0 to 5. The x-axis has two categories: 'Sesuai' and 'Tidak Sesuai'. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 1 and 'Tidak Sesuai' with a value of 5.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	1	Tidak Sesuai	5	 <p>Bar chart for Banjarmasin Tengah. The y-axis ranges from 0 to 8. The x-axis has one category: 'Tidak Sesuai'. A legend indicates 'Tidak Sesuai' with a value of 5.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Tidak Sesuai	5		
Kategori	Jumlah												
Sesuai	1												
Tidak Sesuai	5												
Kategori	Jumlah												
Tidak Sesuai	5												
Banjarmasin Utara	Banjarmasin Selatan												
 <p>Bar chart for Banjarmasin Utara. The y-axis ranges from 0 to 8. The x-axis has two categories: 'Sesuai' and 'Tidak Sesuai'. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 4 and 'Tidak Sesuai' with a value of 4.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	4	Tidak Sesuai	4	 <p>Bar chart for Banjarmasin Selatan. The y-axis ranges from 0 to 3. The x-axis has two categories: 'Sesuai' and 'Tidak Sesuai'. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 1 and 'Tidak Sesuai' with a value of 3.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	1	Tidak Sesuai	3
Kategori	Jumlah												
Sesuai	4												
Tidak Sesuai	4												
Kategori	Jumlah												
Sesuai	1												
Tidak Sesuai	3												
Banjarmasin Barat	Rekapitulasi												
 <p>Bar chart for Banjarmasin Barat. The y-axis ranges from 0 to 5. The x-axis has one category: 'Tidak Sesuai'. A legend indicates 'Tidak Sesuai' with a value of 7.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Tidak Sesuai	7	<p>Urutan wilayah riset dengan fasilitas disabilitas paling banyak tidak sesuai dengan standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjarmasin Barat</li> <li>2. Banjarmasin Timur</li> <li>3. Banjarmasin Tengah</li> <li>4. Banjarmasin Utara</li> <li>5. Banjarmasin Selatan</li> </ol>								
Kategori	Jumlah												
Tidak Sesuai	7												

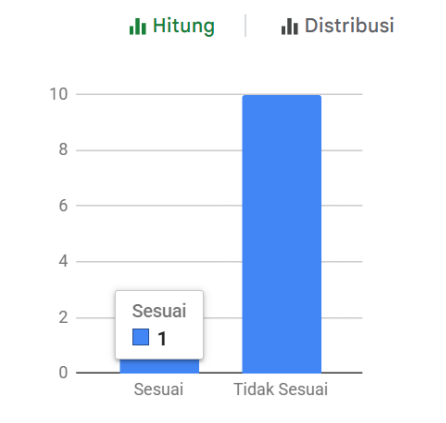
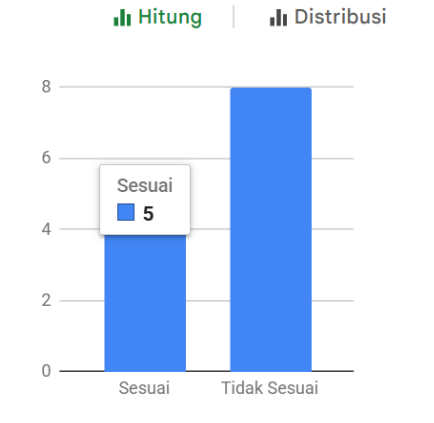
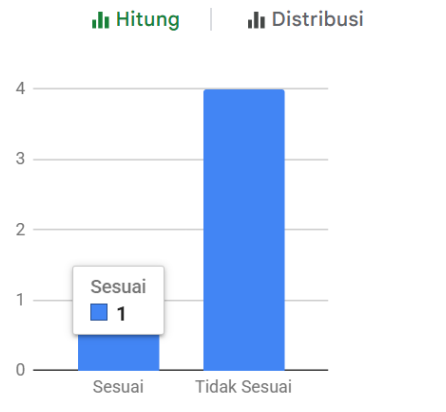
### 3. Kesesuaian Fasilitas Disabilitas Per Instansi

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan jenis instansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor kecamatan merupakan instansi dengan jumlah fasilitas disabilitas yang paling banyak tidak sesuai dengan standar. Kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan publik masih menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik.

Selanjutnya, ketidaksesuaian fasilitas disabilitas pada puskesmas juga ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan. Meskipun beberapa fasilitas khusus disabilitas telah tersedia di seluruh puskesmas, fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Sementara itu, pada lingkungan sekolah masih ditemukan fasilitas disabilitas yang tidak sesuai dengan standar, baik dari aspek ketersediaan maupun dari segi kelayakan penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara optimal pada seluruh jenis instansi yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 4.15: Kesesuaian fasilitas per instansi berdasarkan standar

Kantor Kecamatan	Puskesmas												
 <p>Bar chart for Kantor Kecamatan. The y-axis ranges from 0 to 10. The 'Sesuai' bar has a value of 1, and the 'Tidak Sesuai' bar has a value of 10. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	1	Tidak Sesuai	10	 <p>Bar chart for Puskesmas. The y-axis ranges from 0 to 8. The 'Sesuai' bar has a value of 5, and the 'Tidak Sesuai' bar has a value of 8. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 5.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	5	Tidak Sesuai	8
Kategori	Jumlah												
Sesuai	1												
Tidak Sesuai	10												
Kategori	Jumlah												
Sesuai	5												
Tidak Sesuai	8												
Sekolah	Rekapitulasi												
 <p>Bar chart for Sekolah. The y-axis ranges from 0 to 4. The 'Sesuai' bar has a value of 1, and the 'Tidak Sesuai' bar has a value of 4. A legend indicates 'Sesuai' with a value of 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Sesuai</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah	Sesuai	1	Tidak Sesuai	4	<p>Urutan instansi dengan fasilitas disabilitas paling banyak tidak sesuai dengan standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Kecamatan</li> <li>2. Puskesmas</li> <li>3. Sekolah</li> </ol>						
Kategori	Jumlah												
Sesuai	1												
Tidak Sesuai	4												

#### D. Analisis Hukum Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil observasi di berbagai lokasi di Kota Banjarmasin, secara umum fasilitas bagi penyandang disabilitas sudah tersedia. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar teknis dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya

perbedaan antara jumlah fasilitas yang tersedia dengan kualitas fungsinya di lapangan.

Pada fasilitas *ramp*, sebagian besar bangunan sudah menyediakannya sebagai akses masuk. Akan tetapi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemiringan beberapa *ramp* melebihi batas yang diperbolehkan. Selain itu, masih ada *ramp* yang belum dilengkapi dengan tepi pengaman, permukaan anti-slip, dan ubin peringatan. Padahal, aturan yang berlaku mengharuskan *ramp* tidak hanya tersedia, tetapi juga aman dan mudah digunakan. Dengan demikian, fungsi *ramp* sebagai fasilitas aksesibilitas belum berjalan secara maksimal.

Pada fasilitas *handrail*, sebagian besar lokasi juga sudah menyediakannya. Namun, tinggi *handrail* di beberapa tempat tidak sesuai dengan standar. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna. Jika dikaitkan dengan prinsip desain universal, kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan fasilitas belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pengguna, khususnya penyandang disabilitas.

Selanjutnya, pada fasilitas toilet disabilitas, meskipun sudah tersedia di beberapa lokasi, masih terdapat kekurangan dari segi ukuran ruang, lebar pintu, dan arah bukaan pintu. Beberapa toilet bahkan tidak memungkinkan kursi roda untuk bergerak dengan leluasa. Hal ini tidak sesuai dengan standar ruang minimum yang telah ditetapkan. Akibatnya, fungsi toilet sebagai sarana pendukung kemandirian belum terpenuhi secara optimal.

Pada fasilitas parkir khusus disabilitas, ketersediaannya masih sangat terbatas. Dari lokasi yang diteliti, hanya satu yang menyediakan parkir khusus, dan itu pun belum dilengkapi dengan marka dan tanda yang jelas. Padahal, penanda tersebut penting agar fasilitas dapat dikenali dan digunakan dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan aksesibilitas belum dilakukan secara menyeluruh.

Secara umum, dapat dilihat bahwa penyediaan fasilitas masih lebih menekankan pada keberadaan fisik, sementara aspek fungsi, keamanan, dan kenyamanan belum menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan bahwa penerapan standar teknis belum dilakukan secara maksimal, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan CRPD, khususnya Pasal 9 yang mengatur tentang hak aksesibilitas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan akses pada beberapa fasilitas, sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas belum berjalan secara efektif.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan praktik di lapangan.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 juga telah mengatur kewajiban penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya aksesibel.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas di Kota Banjarmasin sudah menunjukkan adanya upaya pemenuhan, tetapi belum diikuti dengan kualitas yang memadai. Fasilitas yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kemandirian, serta belum terintegrasi dengan baik.

Dari sisi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang sudah cukup lengkap dengan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan utama terletak pada konsistensi penerapan, pengawasan, dan komitmen dalam menjalankan standar yang ada.

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan agar fasilitas yang disediakan tidak hanya ada, tetapi juga benar-benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

Di sisi lain, temuan ini juga perlu dipahami secara realistis. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 masih tergolong baru, sehingga implementasinya masih dalam tahap penyesuaian. Dalam kondisi ini, keberadaan fasilitas yang sudah ada dapat dilihat sebagai langkah awal yang positif.

Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar, keberadaan fasilitas seperti *ramp*, *handrail*, dan toilet disabilitas tetap menunjukkan adanya perkembangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dipahami sebagai proses bertahap menuju kondisi yang lebih ideal.

Namun demikian, kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa perbaikan. Fasilitas yang belum sesuai standar tetap perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, pemenuhan aksesibilitas tidak hanya berhenti pada penyediaan, tetapi juga mencapai kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.